

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG**

#### **1.1. Latar Belakang**

Kerukunan antarumat beragama menjadi fondasi dalam menjaga stabilitas nasional, mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Sejalan dengan pandangan kerukunan Presiden Abdurrahman Wahid<sup>1</sup>, bahwa kerukunan tidak bertujuan menyeragamkan semua ajaran agama, melainkan menjadi sebuah prinsip pentingnya menjaga hubungan baik antarumat beragama meski setiap individu tetap menjalankan akidahnya masing masing.

Indonesia sebagai negara kesatuan multikultural memandang kerukunan sebagai hak individu yang dijamin oleh negara. Hal tersebut telah diamanatkan oleh konstitusi negara dalam Undang Undang Dasar 1945<sup>2</sup>, dalam Pasal 28E ayat (1) yang menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan keyakinannya. Hal tersebut kemudian diperkuat Pancasila dalam sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>3</sup>. Kedua konstitusi tersebut menjadi landasan dalam menjaga kerukunan dan toleransi, karena kebebasan yang dilindungi hukum memungkinkan masyarakat yang multikultural untuk hidup berdampingan. Dengan demikian, dengan adanya landasan konstitusi, kerukunan dianggap sebagai modal sosial untuk memperkuat stabilitas nasional.

Fakta keragama tersebut terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Sensus Penduduk 2010<sup>4</sup>, yang mencatat keberadaan 300 kelompok etnis dengan kurang lebih 1.331 kelompok di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Penetapan Presiden (Penpres) No. 1 Tahun 1965<sup>5</sup>, yang mengakui secara spesifik enam agama resmi, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006)

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28E ayat (1).

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Pancasila, Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, *Sensus Penduduk 2010* (Jakarta: BPS, 2010).

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*.

Konghucu. Hal ini diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017<sup>6</sup> yang mengakui kepercayaan penghayatan sebagai juga diakui sebagai kekayaan spiritual di Indonesia. Yang menggambarkan kekayaan budaya dan keragaman keyakinan yang luar biasa di Nusantara.

Kementerian Agama secara rutin melakukan survei melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dengan mengukur dimensi toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Data IKUB menunjukkan bahwa kerukunan hidup beragama di Indonesia mengalami kemajuan dalam lima tahun terakhir. Indeks nasional meningkat dari 67,46 (2020) menjadi 76,47 (2024)<sup>7</sup>, dengan peningkatan yang stabil setiap tahunnya. Menunjukkan bahwa adanya iklim positif mengenai toleransi antarumat beragama, yang kemudian diharapkan akan semakin berkurangnya pandangan negatif mengenai perbedaan antarindividu.

Tabel 1 : Indeks Kerukunan Antarumat Beragama Nasional

No.	Tahun	Nilai Rata Rata	Keterangan
1.	2020	67,46	Cukup Baik
2.	2021	72,39	Baik
3.	2022	73,09	Baik
4.	2023	76,02	Baik
5.	2024	76,47	Baik

Sumber : Situs Resmi Kementerian Agama RI

Sebagai modal sosial nasional, keragaman dapat menjadi pisau bermata dua yang dapat menjadi potensi menjadi kekuatan sekaligus kerentanan. Sejarah membuktikan bahwa pernah terjadi konflik kelam Indonesia dalam peristiwa 1998. Bermula dari krisis ekonomi dan politik, berubah menjadi kekerasan SARA terutama pada suku Tionghoa Indonesia. Tragedi tersebut mengajarkan bahwa stabilitas dalam masyarakat yang beragam tidak cukup hanya dijamin konstitusi,

<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2017.

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2024", Situs resmi Kementerian Agama RI

tetapi juga membutuhkan sikap kerukunan di akar rumput agar tidak terulang kembali.

Seiring perkembangan zaman, masyarakat akan menghadapi ancaman baru era digital. Tantangan perubahan seperti arus modernisasi dan dari luar berpotensi merusak interaksi masyarakat. Tercatat Kominfo sudah menangani total sebanyak 3.640 konten ujaran kebencian berbasis SARA di ruang digital antara tahun 2017 hingga 2021<sup>8</sup>. Polarisasi politik identitas pada pemilu 2019 menjadi kasus yang paling terbanyak, sentimen kelompok yang dimanfaatkan elite politik untuk mengumpulkan pendukung dengan narasi “Kita lawan mereka” yang berpotensi memecah belah masyarakat. Dalam penanganan penghapusan konten bermasalah tersebut, Kominfo menjelaskan terdapat tiga kriteria yang dijadikan dasar tindakan.

Pertama, konten yang memuat unsur penghinaan terhadap agama-agama yang diakui di Indonesia. Kedua, konten yang mengajak atau mendorong kebencian serta kekerasan terhadap penganut agama tertentu. Kriteria ketiga adalah konten yang berisi ajakan untuk membenci individu berdasarkan identitas kelompok atau suku tertentu. Konten-konten yang telah memenuhi kriteria tersebut telah diblokir dari berbagai situs media sosial. Yang apabila tidak dikelola bisa saja akan berdampak pada ancaman pada kerukunan yang sudah terbentuk sejak lama. Kondisi ini menuntut agar kerukunan tidak hanya dijaga di tingkat nasional, tetapi juga di akar rumput.

Salah satu kebijakan yang ikut membentuk heterogenitas secara massal di tingkat akar rumput adalah program transmigrasi. Kebijakan transmigrasi yang dijadikan program prioritas nasional oleh Presiden Soeharto pada masa orde baru, menjadi salah satu kebijakan sosial ekonomi paling ambisius di Indonesia. Program yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, Bali dan Madura, sekaligus mengembangkan potensi kawasan baru. Dibalik tujuan pembangunan ekonominya, program tersebut secara tidak langsung juga menciptakan heterogenitas sosial di daerah tujuan.

---

<sup>8</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Penanganan Konten Ujaran Kebencian Berbasis SARA di Ruang Digital,” 2021

Kedatangan masyarakat dari program transmigrasi ini yang mengubah struktur demografi karena adanya istilah kelompok transmigran (pendatang) dan penduduk lokal.

Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi salah satu tujuan program transmigrasi tersebut. Karena adanya kebijakan tersebut, Sumatera Selatan yang awalnya mayoritas dihuni oleh suku melayu, berkembang menjadi wilayah yang heterogenitas dengan penambahan suku Jawa, Sunda dan Bali. Saat ini, terdapat 13 kabupaten di Sumatera Selatan yang menjadi tempat tinggal baru masyarakat transmigran dan keturunannya. Meski program serupa telah ada sejak zaman Hindia Belanda pada 1919 untuk wilayah Sumsel, akan tetapi program transmigrasi di zaman tersebut masih dilakukan bersifat paksaan untuk penyaluran tenaga kerja<sup>9</sup>. Baru ketika pada zaman Presiden Soeharto, kebijakan transmigrasi di Sumsel berjalan secara massal yang terstruktur dengan tujuan sebagai pengembangan wilayah baru.

Tabel 2 : Data Penduduk Provinsi Sumatera Selatan 2018

No.	Suku	Jumlah Penduduk	Persentase
1.	Melayu	4.723.149	63,54 %
2.	Jawa	2.037.715	27,41 %
3.	Sunda	180.018	2,42 %
4.	Suku Sumatera Lainnya	326.679	4,36 %
5.	Suku Lainnya	217.481	2,90 %
<b>Total</b>		7.485.042	100 %

Sumber : Situs Resmi Badan Pusat Statistika  
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

Data tersebut menunjukkan adanya perubahan komposisi penduduk di Provinsi Sumatera Selatan karena adanya kebijakan transmigrasi. Suku asli Melayu memang masih menjadi dominan dengan 63,54 %, namun dengan kehadiran suku Jawa sebagai kelompok terbesar kedua dengan lebih dari

<sup>9</sup> Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Database Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023

seperempat dari total penduduk di Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah dan keragaman etnis yang mengubah demografi yang sebelumnya dihuni oleh suku Melayu menjadi lebih multietnis. Kebijakan transmigrasi tidak hanya meningkatkan angka populasi, tetapi juga membawa tradisi dan budaya yang bisa berdampak pada prinsip kerukunan di akar rumput.

Berdasarkan data IKUB dengan wilayah yang lebih diperinci, adanya peningkatan nilai toleransi di Sumatera Selatan setiap tahunnya. Dengan mengukur dimensi toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Menunjukkan bahwa heterogenitas bukanlah hal yang perlu ditakuti sebagai ancaman, tetapi sebagai modal sosial yang dianggap sebagai aset keberagaman yang tidak terwujud.

Tabel 3 : Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Sumsel

No.	Tahun	Nilai Rata Rata	Keterangan
1.	2021	67.87	Cukup Baik
2.	2022	67.05	Cukup Baik
3.	2023	77.32	Baik
4.	2024	76.82	Baik

Sumber : Situs Resmi Kementerian Agama RI

Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu wilayah tujuan transmigrasi di Sumatera Selatan. Saat ini tercatat ada dua kawasan transmigrasi yang masih bertahan, karena banyak kasus masyarakat transmigran yang kesulitan untuk beradaptasi dengan kondisi alam yang berbeda dengan asal daerah. Salah satu wilayah di Sumatera Selatan yang sangat terdampak dengan adanya kebijakan transmigrasi orde baru adalah Kecamatan Tanjung Lago. Meski terjadi arus kepulangan, tercatat saat ini Tanjung Lago mayoritas dihuni oleh transmigran. Kelompok transmigran pertama tiba pada tahun 1980, berasal dari Kediri, Jawa Timur. Untuk memperingatinya, dibangunlah sebuah tugu transmigrasi untuk mengingat momen tersebut.

Berdasarkan data historis, pembentukan Kecamatan Tanjung Lago tidak terlepas dari peran para transmigran. Karena sekitar setengah abad lalu, wilayah disekitar Tanjung Lago masih berupa kawasan hutan hujan tropis yang masih

sangat jarang penduduk. Masyarakat asli, yaitu Suku Melayu dan Bugis yang telah menetap di kawasan ini sejak abad ke-19, mayoritas menetap di sekitar Sungai Musi dan tidak banyak membuka lahan hutan. Proses pembukaan permukiman baru secara signifikan baru dimulai setelah kedatangan para transmigran di Tanjung Lago. Oleh karena itu, proses integrasi antar masyarakat menjadi faktor kunci terbentuknya wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Tanjung Lago.

Salah satu contoh dari bukti konkret dari proses integrasi tersebut adalah Desa Bangun Sari, yang sejak awal dibangun berdasarkan keragaman etnis dan agama. Karena keragaman tersebut, menuntut masyarakat untuk cepat beradaptasi dan saling bertoleransi agar kehidupan di Desa Bangun Sari terbentuk tanpa adanya konflik. Pada masa awal pembentukan desa, masyarakat Bangun Sari membangun permukiman melalui kerja sama, termasuk kegiatan membuka lahan pertanian secara bersama-sama atau yang dikenal dengan istilah “babat hutan bersama”. Kegiatan ini tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat solidaritas dan rasa senasib sepenanggungan antarwarga, tanpa memandang perbedaan agama dan asal daerah.

Keberagaman agama di Desa Bangun Sari, yang terdiri atas Islam, Kristen Katolik, dan Hindu Bali telah membentuk identitas sosial yang plural. Perbedaan agama tidak dianggap sebagai sumber perpecahan, melainkan sebagai modal sosial yang diterima oleh masyarakat. Komunikasi antarumat terjalin erat melalui aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya sehari-hari. Data komposisi keagamaan menunjukkan mayoritas pemeluk Islam sebanyak 4.215 jiwa, diikuti oleh pemeluk Hindu Bali sebanyak 252 jiwa, dan Kristen Katolik sebanyak 27 jiwa dari total 4.494 penduduk<sup>10</sup>. Pola hidup yang harmonis ini mencerminkan bagaimana integrasi sosial berhasil dibangun melalui proses adaptasi yang baik.

Desa Bangun Sari dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik sebagai masyarakat transmigrasi multikultural yang berhasil membangun integrasi sosial di tengah keberagaman suku dan agama. Masyarakat

---

<sup>10</sup> Pemerintah Desa Bangun Sari, Profil Desa Bangun Sari (2025), Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin.

desa ini terdiri atas berbagai kelompok etnis dan agama yang pada masa awal pembentukannya cenderung hidup dalam kelompok masing-masing, namun kemudian berhasil membangun integrasi sosial yang kuat. Salah satu fenomena yang menarik adalah terpilihnya kepala desa yang berasal dari keturunan transmigran Hindu Bali, padahal kelompok Hindu hanya berjumlah sekitar 5% dari total penduduk desa.

Tabel 4 : Demografi Penduduk Desa Bangun Sari Tahun 2024

No.	Kepercayaan	Jumlah Pemeluk	Persentase
1.	Islam	4.215	93,79
2.	Hindu Bali	252	5,61
3.	Kristen Katolik	27	0,6
<b>Total</b>		4.494	100 %

Sumber : Profil Desa Bangun Sari 2024

Berdasarkan profil Desa Bangun Sari (2024)<sup>11</sup>, Desa ini dipimpin oleh Bapak Negah Mirse, yang beragama Hindu dan menjabat sejak periode 2016-2022 serta kembali terpilih untuk periode 2022-sekarang, menunjukkan adanya tingkat penerimaan dan demokrasi lokal yang kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pilihan politik masyarakat tidak lagi didasarkan semata-mata pada kesamaan identitas agama maupun etnis, justru pada kepercayaan terhadap kapasitas dan kepemimpinan individu. Fenomena ini menjadi indikator kuat bahwa integrasi sosial di Desa Bangun Sari telah berkembang sampai pada tingkat kepercayaan sosial dan politik antar kelompok.

Hal ini sejalan dengan teori modal sosial dari Robert Putnam (2000) yang menekankan pentingnya kepercayaan, norma bersama, dan jejaring sosial. Nilai ini dibentuk melalui praktik gotong royong yang mengakar seperti “babat hutan bersama”, serta kerja sama lainnya antarwarga menjadi bentuk nyata dari bonding

<sup>11</sup> Pemerintah Desa Bangun Sari, Profil Desa Bangun Sari (2024), Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin.

dan bridging yang mampu melampaui perbedaan agama dan etnis. Kerukunan ini terbentuk secara alami melalui interaksi sehari-hari, didorong dengan inisiatif bersama antarwarganya. Berdasarkan pelajaran masa lalu, heterogenitas tanpa fondasi akan berisiko memicu konflik, seperti pada masa pemilu 2019. Oleh karena itu, strategi berkelanjutan untuk memelihara kerukunan adalah dengan terus memperkuat modal sosial melalui kepercayaan, pemberdayaan komunitas akar rumput, dan jaringan kolaborasi. Dengan demikian, kerukunan yang lahir dari kesadaran bersama dapat terus bertahan.

Hal ini menjelaskan pentingnya pemberdayaan berbasis akar rumput, yang dibentuk dari bawah melalui partisipasi dan keinginan bersama, bukan hanya mengandalkan intervensi pemerintah. Dalam hal ini, peran Pemerintah Desa hadir sebagai pendukung penguatan sosial dari inisiatif masyarakat yang sudah ada. Bukan menggantikan modal sosial yang sudah lama ada. Dengan demikian, kehadiran Pemerintah Desa terbentuk dari respon lanjutan dari kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan pemberdayaan berbasis akar rumput (*bottom-up*), yang tumbuh dari partisipasi dan kesadaran bersama masyarakat, bukan semata-mata hasil intervensi pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator yang memperkuat inisiatif yang telah berkembang, bukan sebagai aktor utama yang menggantikan peran modal sosial yang sudah ada. Dengan demikian, kehadiran pemerintah desa merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat dalam memperkuat keberlanjutan kerukunan sosial.

Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan melalui Ning Setio, dkk (2024) di Desa Rajabasa Lama II, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur<sup>12</sup>. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya edukasi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai toleransi, meskipun masih adanya sikap fanatisme agama. Namun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa sikap toleransi dapat terbentuk dengan adanya edukasi dan partisipasi masyarakat, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih terbuka terhadap

---

12 N. S. Wati, L. L, dkk., Pemberdayaan Forum Dialog Antaragama untuk Meningkatkan Toleransi Beragama di Desa Rajabasa Lama II, 2024, hlm. 203–210.

perbedaan. Namun demikian, penelitian tersebut masih terdapat beberapa keterbatasan yang menjadi gap penelitian. Penelitian tersebut cenderung menempatkan toleransi sebagai hasil dari intervensi program yang dirancang melalui kegiatan pengabdian, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan bagaimana kerukunan dapat terbentuk secara alami dari dinamika sosial masyarakat. Selain itu, fokus penelitian masih terbatas pada peningkatan pemahaman melalui edukasi serta belum mengkaji secara mendalam cara mempertahankan kerukunan secara berkelanjutan.

Dalam perspektif teori modal sosial yang dikemukakan oleh Robert Putnam, aspek kepercayaan, jaringan sosial, dan norma memiliki peran penting, namun belum menjadi fokus utama dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menekankan pada bagaimana kerukunan antarumat beragama terbentuk secara *bottom-up* melalui modal sosial masyarakat, khususnya dalam desa yang memiliki tingkat heterogenitas, serta peran pemerintah desa berfungsi sebagai fasilitator dalam memperkuat proses tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menekankan bagaimana peran masyarakat dengan modal sosial membangun toleransi jauh sebelum adanya intervensi dari Pemerintah Desa, dengan latar belakang budaya dan agama yang beraneka ragam. Dengan mendalami nilai dan tradisi dalam nilai agama, adat dan cara menyelesaikan konflik sebagai modal sosial.

Tabel 5 : Analisis Pendekatan *Bottom-Up*

<b>Aspek</b>	<b>Pendekatan <i>top-down</i></b>	<b>Pendekatan <i>bottom-up</i></b>
Aktor Utama	Pemerintah	Masyarakat
Pola Relasi	Instruktif	Partisipatif
Keberlanjutan	Bergantung Kebijakan	Lebih berkelanjutan
Kegiatan Awal	FKUB	Gotong Royong

Sumber : Olahan Penulis Berdasarkan Latar Belakang

Berdasarkan analisis tersebut, fokus pada penelitian ini adalah menganalisis bagaimana model pemberdayaan masyarakat yang terdapat pada Desa Bangun Sari. Model yang bukanlah program pemberdayaan yang bersifat *top-down*, melainkan sebuah model kolaboratif yang saat ini memadukan kemandirian masyarakat dengan fasilitasi pemerintah. Tujuannya adalah menciptakan kemandirian berkelanjutan dalam menjaga kerukunan, masyarakat tetap menjadi subjek, sementara pemerintah berperan sebagai pendukung dan pembina.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a) Bagaimana model pemberdayaan partisipatif dalam mendorong terwujudnya integrasi sosial pada masyarakat multikultural di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan model pemberdayaan partisipatif yang menjadi basis integrasi sosial pada masyarakat multikultural di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, dan integrasi sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi

akademik mengenai model pemberdayaan partisipatif sebagai upaya membangun dan memperkuat integrasi sosial dalam masyarakat yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

- a) Untuk umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemberdayaan berbasis partisipasi dalam menjaga dan memperkuat integrasi sosial pada masyarakat multikultural.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman, dan kemampuan penulis dalam menerapkan teori-teori Ilmu Pemerintahan ke dalam penelitian lapangan, khususnya terkait model pemberdayaan partisipatif dan integrasi sosial pada masyarakat multikultural.

#### 1.5. Penelitian Terdahulu

Berbagai kajian telah dilakukan dengan membahas pemberdayaan masyarakat, kerukunan antarmasyarakat dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kerukunan. Kajian-kajian tersebut diharapkan dapat menjadi landasan awal dalam menyusun dan memperkuat konsep penelitian ini. Diharapkan dengan adanya penelitian terdahulu dapat menjadi acuan peneliti dalam menemukan isu-isu pemberdayaan dan mengidentifikasi *research gap* untuk menentukan temuan baru yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

**Pertama**, penelitian yang dilakukan oleh Ning Setio dan kawan-kawan (2024)<sup>13</sup> dengan judul “Pemberdayaan Forum Dialog Antaragama untuk Meningkatkan Toleransi Beragama di Desa Rajabasa Lama II”. Dengan variabel penelitian berupa Toleransi beragama, forum dialog, dan pengembangan forum. Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan toleransi beragama yang dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif berbasis masyarakat. Hasil penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa meskipun tingkat toleransi

---

<sup>13</sup> 13 N. S. Wati, dkk., Pemberdayaan Forum Dialog Antaragama untuk Meningkatkan Toleransi Beragama di Desa Rajabasa Lama II, 2024, hlm. 203–210.

masyarakat tergolong tinggi dan tercermin dalam berbagai aktivitas bersama, masih terdapat tantangan berupa rendahnya pemahaman tentang toleransi dan munculnya fanatisme keagamaan. Namun demikian, keterlibatan aktif masyarakat, peran tokoh agama, serta dukungan pemerintah desa menjadi faktor dalam menciptakan dan mempertahankan kerukunan umat beragama.

**Kedua**, penelitian yang dilakukan oleh Yulius Rustan (2023)<sup>14</sup> yang berjudul “Membangun Kehidupan Toleransi Beragama dalam Komunitas Pelayanan Dialog Antaragama St. Ignasius Loyola dalam wilayah Paroki Kepanjen, Malang”. Dengan variabel penelitian berupa dialog antaragama, pemberdayaan dan toleransi beragama. Temuan dari penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui komunitas pelayanan berhasil dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, dialog, berbagi pengalaman untuk mengubah pemahaman dan pandangan negatif. Dengan demikian, para peserta diharapkan dapat lebih menghargai perbedaan latar belakang dan keyakinan dalam kehidupan sehari-hari.

**Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh Yulius Rustan (2023)<sup>15</sup>, dengan judul penelitian “Pemberdayaan Semangat Toleransi Beragama dalam Komunitas Pelayanan Dialog Antar-Agama”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan; toleransi beragama; komunitas dialog antarumat beragama. Hasil penelitian yang ditemukan dari pemberdayaan komunitas berbasis ceramah dan tanya jawab dari penelitian ini, merupakan cara paling efektif untuk jangka pendek. Karena peserta dapat mengetahui tentang pentingnya toleransi dalam masyarakat multikultural secara teoritis, diharapkan teori tersebut dapat diaplikasikan peserta dalam kehidupan bermasyarakat.

**Keempat**, penelitian yang dilakukan oleh Tursity Attatwa (2025)<sup>16</sup> dengan judul penelitian “Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pembangunan

---

<sup>14</sup> Effendi, Y. R. Membangun Kehidupan Toleransi Beragama dalam Komunitas Pelayanan Dialog Antaragama St. Ignasius Loyola dalam wilayah Paroki Kepanjen, Malang. *Bakti Budaya*, 6 (2), 134–139. 2023.

<sup>15</sup> Effendi, Yulius Rustan. Pemberdayaan Semangat Toleransi Beragama Dalam Komunitas Pelayanan Dialog Antar-Agama Di Kecamatan Kepanjen, Malang. *Abdimas Altruis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2023, 6.1: 14-18.

<sup>16</sup> Idinastika, Tursity Attatwa. Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat. *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities*, 2025, 3.2: 147-155.

Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat”. Dengan variabel penelitian berupa Moderasi Beragama, Pembangunan Ekonomi, Pemberdayaan. Temuan dari penelitian ini adalah rekomendasi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan berkelanjutan berupa moderasi agama. Moderasi tersebut dilakukan agar masyarakat lebih mengedepankan sikap yang tidak berlebihan dalam memandang perbedaan, sehingga masyarakat diharapkan lebih mampu menghargai sebuah perbedaan ditengah tengah masyarakat.

**Kelima**, penelitian yang dilakukan oleh Windasai dan kawan kawan (2021)<sup>17</sup> dengan judul penelitian “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalemba Kabupaten Sumenep)”. Dengan variabel penelitian berupa peran pemerintah, pemberdayaan, nelayan. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat belum terlaksana maksimal karena masih bergantung dengan peran pemerintah Kabupaten, terutama pada pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan.

**Keenam**, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Viki (2022)<sup>18</sup> dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi”. Dengan variabel berupa peran Pemerintah Desa, pemberdayaan, masyarakat petani dan Desa Kertamukti. Hasil dari penelitian tersebut adalah Pemerintah Desa berhasil melaksanakan pemberdayaan karena memiliki peran sebagai dinamisator dan fasilitator, sehingga pemberdayaan dapat dilakukan karena pemerintah memiliki kewenangan dibidang tersebut.

Berdasarkan analisis berdasarkan keenam penelitian terdahulu diatas, ditemukan bahwa mayoritas kajian lebih menekankan pendekatan *top-down*. Belum banyak penelitian yang mengkaji pemberdayaan berbasis kerukunan yang tumbuh secara alami (*bottom-up*). Artinya, proses pemberdayaan kerukunan antarumat beragama lebih banyak digerakkan oleh peran dan kewenangan

---

<sup>17</sup> Windasai, Mohammad Mas’ud, Hayat. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, 2021, 2.3: 793-804.

<sup>18</sup> Desa, Peran Pemerintah. Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. 2022.

pemerintah, atau melalui forum dialog, pelatihan, pembinaan, atau komunitas keagamaan yang diinisiasi lembaga non formal. Pemberdayaan masih mengandalkan faktor eksternal, belum sepenuhnya dari inisiatif masyarakat setempat.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menawarkan kajian model pemberdayaan berbasis kerukunan yang tumbuh secara alami dari akar rumput. Model tersebut dibangun atas fondasi nilai sosial, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan modal sosial lokal di Desa Bangun Sari. Dengan menekankan konsep pemberdayaan yang *bottom-up* dan partisipatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan kerukunan di tingkat lokal, sekaligus memperkaya akademik mengenai pendekatan pemberdayaan yang *bottom-up*.

## **1.6. Kerangka Teori**

### **1.6.1. Teori Pemberdayaan Partisipatif**

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses yang dapat merubah masyarakat menjadi keadaan yang lebih baik. Menurut Sumardjo, (2003) pemberdayaan masyarakat merupakan proses memberikan kesempatan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memperbaiki kualitas hidup, sehingga dapat menentukan masa depan yang lebih baik<sup>19</sup>. Karena itu, Sumardjo memandang bahwa dengan adanya partisipasi dari masyarakat dapat menjadi alat dalam mencapai tujuan pemberdayaan. Keberhasilan proses ini bergantung pada partisipasi masyarakat, yang difasilitasi oleh para pelaku pemberdayaan.

Sumardjo berpendapat bahwa tujuan dari partisipasi tersebut agar memandirikan masyarakat dan masyarakat mampu meningkatkan taraf hidupnya serta mengoptimalkan pemanfaatan segala sumberdaya yang tersedia, sehingga kemandirian yang dicapai bukanlah akhir dari tujuan, tetapi awal dari pembangunan berkelanjutan yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Sumardjo

---

<sup>19</sup> Sumardjo. Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pemberdayaan Kemandirian Petani. 1999.

berpendapat bahwa tanpa adanya keterlibatan aktif masyarakat sejak awal, bantuan apa pun yang diberikan akan menciptakan ketergantungan. Masyarakat akan mendukung suatu program jika mereka ikut dilibatkan, masyarakat merasa dapat menentukan arah pembangunan yang akan mempengaruhi hidup mereka.

Lebih lanjut, pemberdayaan partisipatif menjadikan masyarakat sebagai subjek. Sehingga pendekatan model ini menjelaskan bahwa perubahan harus datang dari akar rumput (*bottom-up*). Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan mulai menjadi kunci agar program yang dijalankan memiliki rasa kepemilikan. Keberlanjutan hanya akan terjadi jika masyarakat merasa bahwa keberhasilan program tersebut adalah hasil dari usaha sendiri. Peran fasilitator bukan sebagai penentu keputusan, melainkan sebagai pemicu bagi masyarakat terhadap potensi yang mereka miliki.

Kajian ini juga ditambah dengan pendapat dari Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) yang memandang bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang direncanakan secara sadar untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya<sup>20</sup>. Oleh karena itu, pemberdayaan membutuhkan tahapan yang sistematis dan berkelanjutan. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto membagi proses pemberdayaan menjadi 3 tahap. Yaitu :

- a) Tahap pertama adalah penyadaran. Tahap ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat melalui dialog, refleksi, dan tindakan. Sehingga masyarakat mampu memahami masalah, menganalisis penyebabnya, lalu bertindak untuk perubahan. Pada tahap ini masyarakat didorong untuk memahami bahwa mereka memiliki kemampuan dan sumber daya yang dapat dikembangkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Penyadaran juga bertujuan mengubah pola pikir masyarakat dari sikap pasif menjadi lebih percaya diri dan memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

---

<sup>20</sup> Wrihatnolo, Dwidjowijoto. Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. 2007.

- b) Tahap kedua adalah penguatan kapasitas. Setelah masyarakat memiliki kesadaran untuk berubah, proses pemberdayaan dilanjutkan dengan peningkatan kemampuan yang diperlukan untuk mewujudkan perubahan tersebut. Penguatan kapasitas mencakup pengembangan kemampuan berorganisasi, komunikasi, pengambilan keputusan, dan kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Pada tahap ini masyarakat mulai menyatukan pandangan, kepentingan, dan tujuan bersama sehingga terbentuk kesepakatan mengenai arah pembangunan yang ingin dicapai.
- c) Tahap ketiga adalah kemandirian. Tahap ini merupakan tujuan dari proses pemberdayaan, yaitu ketika masyarakat telah memiliki kemampuan, kepercayaan diri, dan kesempatan untuk mengelola sumber dayanya secara mandiri. Kemandirian merupakan kondisi ketika masyarakat memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan, mengelola potensi yang dimiliki, dan menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap pihak eksternal. Sehingga, masyarakat menjadi subjek pembangunan yang aktif dan mampu mempertahankan hasil-hasil pembangunan secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, dari ketiga tahapan tersebut, Wrihatnolo dan Dwidjowijoto berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan proses yang berlangsung secara bertahap. Penyadaran menghasilkan kemauan untuk berubah, penguatan kapasitas menghasilkan kemampuan untuk bertindak, sedangkan kemandirian menghasilkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mempertahankan perubahan secara berkelanjutan. Sehingga, keberhasilan pemberdayaan dilihat dari sejauh mana masyarakat mampu bertindak secara mandiri dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Proses ini dilaksanakan dengan prinsip bahwa pemberdayaan harus dilakukan secara sengaja, dilaksanakan secara bertahap mulai dari peningkatan kesadaran hingga pemberian kepercayaan, serta berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan, sehingga masyarakat mampu mengelola sumber dayanya secara mandiri demi mendukung pembangunan jangka panjang. Dalam hal ini, hasil dari proses pemberdayaan adalah tahap penyadaran, yaitu proses

membangun pemahaman masyarakat bahwa setiap perbedaan sosial, budaya, dan agama merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan Desa, sehingga masyarakat mampu menempatkan kepentingan desa di atas kepentingan kelompok.

### 1.6.2. Teori Modal Sosial

Dalam kajian penelitian pemberdayaan masyarakat, modal sosial merupakan satu konsep dalam memahami hubungan sosial dalam mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pendapat dari Field (2014) yang memandang bahwa modal sosial menjadi wadah hubungan yang memungkinkan individu dalam kelompok untuk bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai persoalan<sup>21</sup>. Modal sosial dianggap untuk menciptakan terwujudnya solidaritas yang dibentuk oleh rasa saling percaya yang terdapat dalam ikatan sosial. Dengan demikian, modal sosial terbentuk pada komunikasi yang terdapat antara individu tersebut dalam mencapai tujuan bersama. Hal tersebut yang menjadikan modal sosial sebagai aset berharga yang tidak berwujud.

Field berpendapat bahwa modal sosial memiliki pengaruh dalam pembangunan sosial. Modal sosial memiliki peran untuk menumbuhkan kesadaran individu terhadap peluang yang dapat dikembangkan demi kepentingan bersama, sehingga masyarakat menjadi subjek dalam pembangunan. Modal sosial dapat memperkuat masyarakat dalam menyelesaikan masalah karena menumbuhkan kesadaran untuk bekerjasama demi meningkatkan kualitas hidup. Hal ini disebabkan adanya rasa saling percaya karena membuka hubungan dalam jejaring antarmasyarakat. Yang artinya, pembangunan manusia berjalan seiring dan selaras dengan pembangunan sosial.

Lebih lanjut, Robert Putnam (2000) menjelaskan bahwa modal sosial terbentuk dari tiga unsur utama, yaitu kepercayaan (*trust*), norma (*norms*), dan jejaring sosial<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Field, John. *Social Capital*. 2010.

<sup>22</sup> Putnam, R. *Bowling alone: America's declining social capital*. In: Crothers, L., Lockhart, C. (Eds.). *Culture and Politics*. Palgrave Macmillan, 2000. 223–234.

- a) Kepercayaan (*trust*) merupakan keyakinan bahwa individu atau kelompok lain akan bertindak secara jujur, konsisten, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam konteks modal sosial, semakin tinggi tingkat kepercayaan antarmasyarakat, semakin besar peluang terjadinya partisipasi, gotong royong, dan tindakan kolektif untuk mencapai tujuan bersama.
- b) Norma (*norms*) merupakan aturan, nilai, atau kesepakatan sosial yang menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Norma berfungsi mengatur hubungan sosial agar berjalan harmonis. Norma yang dipatuhi bersama akan memperkuat rasa kebersamaan dan memudahkan masyarakat untuk melakukan kerja sama karena terdapat kesamaan pemahaman mengenai perilaku yang dianggap baik dan dapat diterima.
- c) Jejaring merupakan hubungan yang menyatukan individu atau kelompok dalam suatu sistem sosial. Melalui jejaring sosial, masyarakat dapat memperluas hubungan di luar lingkaran terdekatnya sehingga terbuka peluang untuk membangun kerja sama yang lebih luas.

Lebih lanjut, Putnam (2000) membagi modal sosial menjadi dua bentuk, yaitu *bonding social capital* (modal sosial sebagai pengikat) dan *bridging social capital* (modal sosial sebagai jembatan). Kedua bentuk modal sosial ini menjelaskan bagaimana hubungan sosial terbentuk dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Putnam, masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang dapat menjalankan *bonding social capital* dan *bridging social capital* bersama. Kedua bentuk modal sosial tersebut bersifat saling melengkapi. Tanpa *bonding*, masyarakat akan kehilangan rasa kebersamaan. Tanpa *bridging*, masyarakat berisiko tersegregasi ke dalam kelompok-kelompok yang terisolasi satu sama lain.

*Bonding social capital* merupakan modal sosial yang terbentuk dari individu atau kelompok yang memiliki kesamaan identitas, seperti kesamaan etnis, agama, budaya, kekerabatan, maupun pengalaman sosial. Putnam mengibaratkan bentuk modal sosial ini sebagai *social glue* atau “lem sosial” karena berfungsi memperlerat hubungan internal dalam suatu kelompok. *Bonding social capital* ditandai dengan tingginya solidaritas dan rasa memiliki di antara anggota

kelompok. Akan tetapi, *bonding social capital* juga memiliki keterbatasan. Ikatan yang terlalu kuat di dalam kelompok dapat menimbulkan eksklusif dan membatasi hubungan dengan kelompok lain. Akibatnya, kelompok dapat menjadi tertutup terhadap perbedaan dan berpotensi menimbulkan jarak sosial dengan kelompok di luar komunitasnya. Sehingga, *bonding social capital* yang kuat perlu diimbangi dengan bentuk modal sosial lainnya agar tidak berkembang menjadi sikap primordialisme atau eksklusivitas kelompok.

Lebih lanjut, *bridging social capital* merupakan modal sosial yang menghubungkan individu atau kelompok yang memiliki latar belakang berbeda. Putnam menyebutnya sebagai *social bridge* atau “jembatan sosial” karena berfungsi membangun hubungan antaridentitas, berdasarkan perbedaan etnis, agama, budaya, dan status sosial. *Bridging social capital* ditandai oleh sikap terbuka, toleransi, saling percaya, serta kemauan untuk bekerja sama dengan pihak yang berbeda. Melalui hubungan tersebut, masyarakat memperoleh akses terhadap informasi, pengalaman, dan sumber daya yang lebih luas dibandingkan yang tersedia dalam kelompoknya sendiri. Dalam masyarakat yang heterogen, *bridging social capital* memiliki peran karena mampu mengurangi prasangka sosial, memperkuat komunikasi antarkelompok, serta menciptakan ruang interaksi yang mendorong kerja sama. Keberadaan hubungan antarkelompok memungkinkan masyarakat membangun identitas kolektif yang lebih luas tanpa harus menghilangkan identitas asal masing-masing kelompok.

Dari pemikiran kedua ahli tersebut, menjelaskan bahwa modal sosial menjadi pijakan awal bagi individu berdasarkan kepercayaan, norma dan jaringan. Karena modal sosial menjadi perekat yang mempermudah kerja sama melalui hubungan sosial yang tepat. Hubungan sosial yang didasari dari suatu kesamaan berubah menjadi modal bagi komunitas dalam menghadapi masalah bersama. Keberhasilan tersebut sangat bergantung pada seberapa kepercayaan masyarakat dan ikatan emosional antarindividu. Oleh karena itu, modal sosial dapat dianggap sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat bekerja lebih efektif melalui komunikasi dalam sehari-hari.

## **1.7. Operasional Konsep**

### **1.7.1. Pemberdayaan Masyarakat Partisipatif**

Pada bagian ini peneliti menggunakan pendekatan pemberdayaan dari Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Konsep ini berlandaskan teori pemberdayaan masyarakat yang menekankan kemampuan masyarakat dalam permasalahan, mengambil keputusan, serta mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Kemudian diperkuat dengan teori modal sosial dari Robert Putnam yang menekankan pada pentingnya *bonding social capital* dan *bridging social capital* dalam membangun integrasi sosial. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana proses pemberdayaan tidak hanya terjadi melalui kebijakan, tetapi juga tumbuh secara alami dari interaksi sosial masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam operasionalnya, model ini melalui tiga tahapan, yaitu :

#### **a) Pembentukan kesadaran**

Pembentukan kesadaran dalam pemberdayaan masyarakat merupakan proses membangun pemahaman bahwa setiap perbedaan sosial, budaya, dan agama merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini, masyarakat mulai memiliki kesadaran yang ditandai dengan munculnya keinginan untuk berubah, sehingga berhasil mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Dari tahap ini akan menjadi awal mula terbentuknya modal sosial, yang berfungsi sebagai sumberdaya dalam terciptanya integrasi masyarakat.

#### **b) Tahap pengkapasitasan**

Tahap pengkapasitasan merupakan proses meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Tahap ini dimulai setelah adanya kesadaran masyarakat untuk berinteraksi yang kemudian membentuk rasa percaya diri dalam membangun jejaring antarkelompok. Tahapan ini menjadi proses puncak pemanfaatan modal sosial dalam mencapai integrasi masyarakat. Peneliti merujuk pada pandangan Robert D.

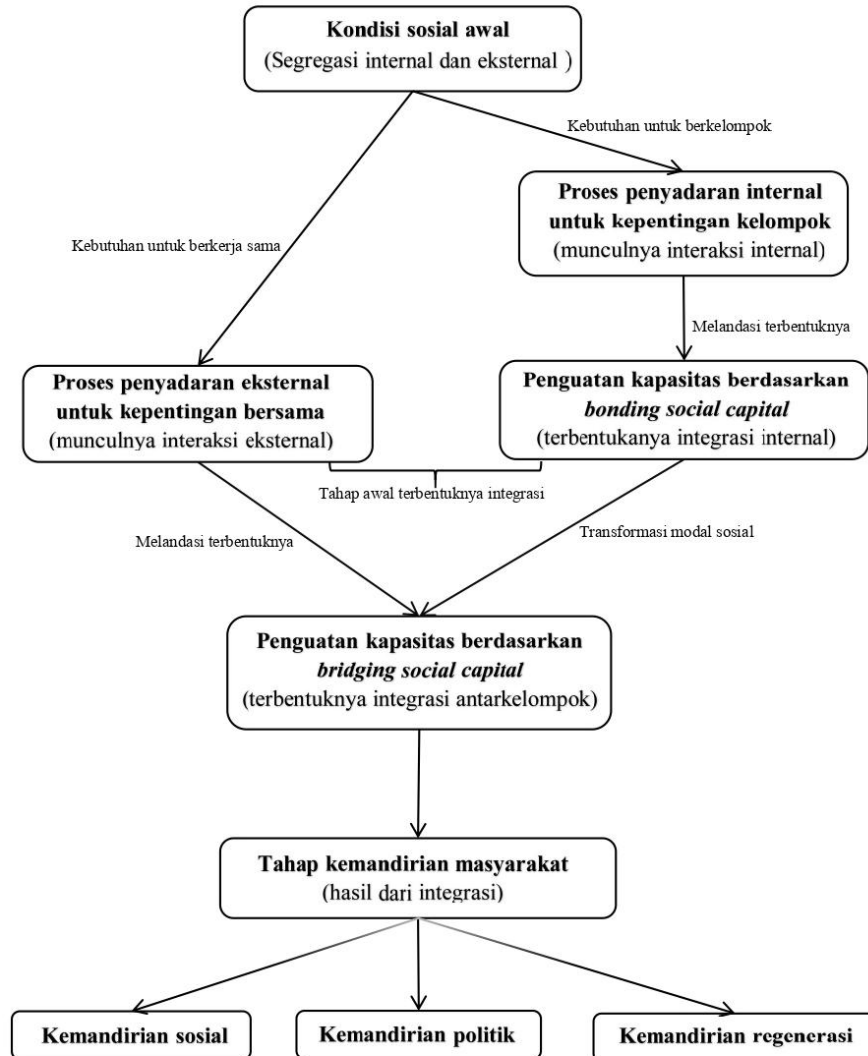
Putnam yang menyatakan bahwa modal sosial dapat menjadi wadah dalam proses integrasi melalui dua bentuk , yaitu *bonding social capital* (pengikat) dan *bridging social capital* (jembatan). Kedua bentuk modal sosial tersebut menjadi dasar bagi peneliti dalam mengidentifikasi penguatan integrasi masyarakat yang berlangsung di Desa Bangun Sari.

- 1) Pemanfaatan *bonding social capital* (pengikat) melalui solidaritas kelompok, kepercayaan internal antar anggota masyarakat, serta norma bersama dalam kehidupan sosial.
- 2) Pemanfaatan *bridging social capital* (jembatan) melalui kerjasama antarkelompok, sikap toleransi dalam perbedaan, rasa saling percaya antarkomunitas, kesetaraan peran dalam berbagai kegiatan sosial, serta adanya kesepakatan bersama yang dibangun untuk menjaga keharmonisan dan keberlanjutan pembangunan desa.

### **c) Tahap kemandirian**

Pada tahap ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengelola sumber daya secara mandiri tanpa bergantung pada pihak lain. Pemberdayaan berbasis inisiatif ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pembangunan desa. Kemandirian ini merupakan hasil dari pemanfaatan modal sosial yang telah dibangun melalui tahap penyadaran dan penguatan kapasitas. Proses bertahap yang dimulai dengan penyadaran akan potensi yang dimiliki, kemudian diperkuat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam bekerja sama dan mengelola sumber daya bersama.

## 1.8. Kerangka Berpikir



Sumber : Olahan Penulis

## 1.9. Argumen Penelitian

Masyarakat yang terbentuk melalui program transmigrasi memiliki potensi segregasi akibat perbedaan suku, agama dan budaya. Segregasi tersebut dapat menjadi potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Penelitian ini berargumen bahwa masyarakat Desa Bangun Sari berhasil bergerak dari kondisi sosial yang tersegregasi menuju integrasi melalui model pemberdayaan masyarakat berbasis

partisipasi masyarakat. Model ini terbentuk melalui proses bertahap, dimulai dari kesadaran untuk hidup berdampingan, kemudian penguatan kapasitas melalui interaksi dan kerja sama antarkelompok, hingga terciptanya kemandirian masyarakat.

Oleh karena itu, integrasi di Desa Bangun Sari terbentuk melalui pemanfaatan modal sosial berupa kepercayaan, norma, serta jejaring. Model pemberdayaan ini menjadi mekanisme yang mentransformasikan segregasi menjadi integrasi dalam masyarakat multikultural. Pemahaman atas model ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat kerangka serupa di daerah-daerah heterogen lainnya, sekaligus memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan pembangunan masyarakat berbasis modal sosial.

## **1.10. Metode Penelitian**

### **1.10.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena dianggap paling sesuai untuk memahami fenomena sosial yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat berbasis integrasi di Desa Bangun Sari, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan dinamika interaksi dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam kehidupan sosial-keagamaan di desa. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi proses, faktor pendukung, dan tantangan dalam membangun kerukunan, serta menganalisis perannya sebagai modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat.

Menurut Anggito dan Setiawan (2018), pendekatan ini efektif untuk menggambarkan fenomena sosial secara mendalam dan menyeluruh, menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati. Sementara itu, Creswell (2015) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku, interaksi, dan

proses yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga, metode ini dipandang relevan untuk menggambarkan kondisi sosial masyarakat Desa Bangun Sari yang memiliki latar belakang agama, suku, dan budaya yang beragam, tetapi mampu membangun kehidupan sosial yang harmonis.

Penggunaan metode kualitatif deskriptif juga bertujuan agar peneliti dapat memperoleh data secara alami sesuai kondisi yang terjadi di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui interaksi langsung dengan masyarakat dan para informan yang terlibat dalam kehidupan sosial-keagamaan di Desa Bangun Sari. Sehingga, peneliti dapat memahami tindakan, pengalaman, dan pandangan masyarakat terhadap pentingnya integrasi masyarakat multikultural sebagai modal sosial dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara kerukunan sosial dengan penguatan kapasitas masyarakat dalam membangun kehidupan desa yang harmonis, mandiri, dan partisipatif.

### **1.10.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Desa ini dipilih sebagai lokus penelitian karena merupakan representasi dari komunitas heterogen hasil program transmigrasi, yang dihuni oleh beragam suku dan agama. Lokasi ini memiliki masyarakat yang hidup berdampingan serta model pemberdayaan masyarakat yang tumbuh dari akar rumput.

### **1.10.3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan terkait dinamika sosial dan kerukunan antarumat beragama di lokasi penelitian (Moleong, 2012). Untuk mendapatkan perspektif yang beragam peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, subjek penelitian meliputi:

- 1) Pemerintah Setempat : Kepala Desa Bangun Sari.
- 2) Tokoh Agama dan Adat : Kepala Adat Hindu, Tokoh Masyarakat .

3) Anggota Masyarakat : Generasi Awal Transmigran.

Penelitian ini melibatkan sejumlah informan yang dipilih secara *purposive sampling* untuk memperoleh data yang berkaitan dengan proses integrasi dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bangun Sari. Narasumber terdiri dari pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, dan transmigran generasi pertama. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan keterlibatan, pengalaman, serta peran mereka sejak masa awal transmigrasi hingga saat ini. Keberagaman latar belakang informan ini memberikan triangulasi data yang kuat karena mempertemukan perspektif pemerintah desa sebagai fasilitator integrasi, tokoh agama dan adat sebagai penjaga nilai sosial, dan masyarakat generasi awal sebagai pelaku langsung proses transmigrasi.

Tabel 6 : Distribusi Narasumber

<b>Kategori</b>	<b>Nama</b>	<b>Status</b>	<b>Keterangan</b>
Pemerintah Desa	Negah Mirse	Kepala Desa Bangun Sari, generasi kedua transmigran	Aspek sejarah desa dan kebijakan pemerintah desa
Generasi Awal Transmigran	Petrus	Transmigran generasi pertama asal Malang	Aspek sejarah dan kondisi masyarakat awal
Tokoh Adat dan Agama Hindu-Bali	I Ketut	Ketua adat Hindu-Bali, generasi kedua transmigran	Aspek peran ketua adat Hindu dan penjaga budaya
Tokoh Agama Islam	Rahmad Udin	Tokoh agama Islam desa, pengurus NU tingkat kecamatan, dan generasi pertama translok Melayu	Aspek integrasi masyarakat islam dan transmigrasi lokal
Transmigran	Nana Supriatna	Transmigran asal Banten	Aspek kondisi masyarakat suku Sunda

Sumber: Olah Data Peneliti, 2026.

Pemilihan informan transmigran dalam penelitian ini dibatasi pada transmigran generasi pertama dan generasi kedua. Transmigran generasi pertama didefinisikan sebagai individu yang pada saat program transmigrasi berlangsung berstatus sebagai orang dewasa atau kepala keluarga dan mengalami secara langsung proses perpindahan dari daerah asal menuju wilayah transmigrasi. Kelompok ini dipilih karena memiliki pengalaman langsung mengenai kondisi

awal pemukiman, proses adaptasi, pola interaksi antarsuku dan antaragama pada masa awal kedatangan, dan berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat transmigran. Informan generasi pertama diwawancarai karena mampu memberikan informasi historis yang tidak dapat diperoleh dari sumber lain, khususnya mengenai proses terbentuknya hubungan dan dinamika kehidupan masyarakat pada masa awal.

Sementara itu, transmigran generasi kedua merupakan individu yang pada saat perpindahan masih berusia anak-anak atau lahir dan dibesarkan di wilayah transmigrasi setelah orang tuanya mengikuti program transmigrasi. Kelompok ini dipilih karena mengalami secara langsung proses perkembangan masyarakat dari masa awal transmigrasi hingga kondisi saat ini. Informan generasi kedua diwawancarai untuk memperoleh informasi mengenai perubahan pola hubungan sosial, proses pewarisan nilai-nilai kerukunan, dan perkembangan kehidupan masyarakat yang terjadi antar generasi.

Berdasarkan distribusi subjek penelitian, penelitian ini melibatkan narasumber dari berbagai latar belakang, agama, generasi, dan posisi di Desa Bangun Sari. Keberagaman narasumber ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai proses integrasi sosial masyarakat transmigran dari masa awal kedatangan hingga terbentuknya kemandirian masyarakat multikultural. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan mereka terhadap dinamika sosial masyarakat desa. Melalui kombinasi antara pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, generasi awal transmigran, hingga generasi muda, penelitian ini memperoleh triangulasi data yang memperkuat analisis mengenai pembentukan modal sosial, toleransi beragama, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan integrasi sosial di Desa Bangun Sari.

#### **1.10.4. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan gejala, fakta, atau kejadian secara jelas dan akurat, serta memberikan pemahaman karakteristik suatu wilayah (Hardani, dkk, 2020, hal. 54).

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai proses pemberdayaan masyarakat berbasis kerukunan antarumat beragama di Desa Bangun Sari, Kabupaten Banyuwasin.

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan interaksi langsung dengan informan penelitian. Data primer digunakan untuk menggali informasi mengenai sejarah sosial masyarakat transmigran, proses integrasi sosial, bentuk kerukunan antarumat beragama, serta peran modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bangun Sari. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa informan sebagai berikut:

##### a) Pemerintah Desa Bangun Sari

Data yang diambil berupa sejarah perkembangan desa, kebijakan pemerintah desa dalam menjaga kerukunan masyarakat, serta bentuk pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada kehidupan sosial dan keagamaan. Informan dalam kategori ini adalah Negah Mirse selaku Kepala Desa Bangun Sari dan generasi kedua transmigran.

##### b) Generasi Awal Transmigran

Data yang diambil berupa kondisi kehidupan masyarakat pada masa awal transmigrasi, pola hubungan sosial antarwarga, bentuk adaptasi masyarakat transmigran, serta dinamika konflik dan integrasi sosial yang terjadi pada masa awal pembentukan desa. Informan dalam kategori ini adalah Petrus sebagai transmigran generasi pertama asal Malang.

##### c) Tokoh Adat dan Agama Hindu-Bali

Data yang diambil berupa peran tokoh adat dalam menjaga budaya, membangun solidaritas sosial, menyelesaikan konflik masyarakat, serta menjaga kerukunan antarumat beragama di Desa Bangun Sari. Informan dalam kategori ini adalah I Ketut selaku ketua adat Hindu-Bali dan generasi kedua transmigran.

d) Tokoh Agama Islam

Data yang diambil berupa proses integrasi masyarakat Islam dengan kelompok transmigran lainnya, bentuk toleransi antarumat beragama, kegiatan sosial-keagamaan masyarakat, serta peran tokoh agama dalam memperkuat persatuan masyarakat desa. Informan dalam kategori ini adalah Rahmad Udin selaku tokoh agama Islam desa, pengurus Nahdlatul Ulama tingkat kecamatan, dan generasi pertama transmigrasi lokal Melayu.

Melalui data primer tersebut, peneliti berupaya memperoleh gambaran secara langsung mengenai kehidupan sosial masyarakat Desa Bangun Sari, khususnya terkait proses terbentuknya kerukunan antarumat beragama sebagai modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui dokumen, arsip, literatur, maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian lapangan serta membantu peneliti memahami kondisi umum wilayah penelitian.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen RPJMDes Desa Bangun Sari, profil desa, arsip kegiatan masyarakat, dokumentasi desa, jurnal ilmiah, buku, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan transmigrasi, modal sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kerukunan antarumat beragama. Data sekunder tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah transmigrasi di Desa Bangun Sari, kondisi sosial masyarakat, komposisi penduduk berdasarkan agama dan suku, perkembangan kehidupan sosial masyarakat, serta kebijakan dan program pemberdayaan yang berkembang di desa. Selain itu, data sekunder juga membantu peneliti dalam menganalisis proses perubahan hubungan sosial masyarakat dari pola hubungan berbasis kelompok asal menuju hubungan sosial yang lebih integratif dan harmonis antarkelompok masyarakat.

### **1.10.5. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan gejala, fakta, atau kejadian secara jelas dan akurat, serta memberikan pemahaman karakteristik suatu wilayah (Hardani, dkk, 2020, hal. 54). Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi untuk memahami kehidupan masyarakat secara mendalam melalui pengkajian nilai-nilai budaya, pola interaksi sosial, pengalaman hidup, dan makna yang dimiliki masyarakat dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana masyarakat Desa Bangun Sari memaknai kebersamaan, toleransi, dan kerja sama yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari proses pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai proses pemberdayaan masyarakat berbasis kerukunan antarumat beragama di Desa Bangun Sari, Kabupaten Banyuasin.

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan interaksi langsung dengan informan penelitian. Data primer digunakan untuk menggali informasi mengenai sejarah sosial masyarakat transmigran, proses integrasi sosial, bentuk kerukunan antarumat beragama, serta peran modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bangun Sari. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa informan sebagai berikut:

##### **e) Pemerintah Desa Bangun Sari**

Data yang diambil berupa sejarah perkembangan desa, kebijakan pemerintah desa dalam menjaga kerukunan masyarakat, serta bentuk pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada kehidupan sosial dan keagamaan. Informan dalam kategori ini adalah Negah Mirse selaku Kepala Desa Bangun Sari dan generasi kedua transmigran.

f) Generasi Awal Transmigran

Data yang diambil berupa kondisi kehidupan masyarakat pada masa awal transmigrasi, pola hubungan sosial antarwarga, bentuk adaptasi masyarakat transmigran, serta dinamika konflik dan integrasi sosial yang terjadi pada masa awal pembentukan desa. Informan dalam kategori ini adalah Petrus sebagai transmigran generasi pertama asal Malang.

g) Tokoh Adat dan Agama Hindu-Bali

Data yang diambil berupa peran tokoh adat dalam menjaga budaya, membangun solidaritas sosial, menyelesaikan konflik masyarakat, serta menjaga kerukunan antarumat beragama di Desa Bangun Sari. Informan dalam kategori ini adalah I Ketut selaku ketua adat Hindu-Bali dan generasi kedua transmigran.

h) Tokoh Agama Islam

Data yang diambil berupa proses integrasi masyarakat Islam dengan kelompok transmigran lainnya, bentuk toleransi antarumat beragama, kegiatan sosial-keagamaan masyarakat, serta peran tokoh agama dalam memperkuat persatuan masyarakat desa. Informan dalam kategori ini adalah Rahmad Udin selaku tokoh agama Islam desa, pengurus Nahdlatul Ulama tingkat kecamatan, dan generasi pertama transmigrasi lokal Melayu.

Melalui data primer tersebut, peneliti berupaya memperoleh gambaran secara langsung mengenai kehidupan sosial masyarakat Desa Bangun Sari, khususnya terkait proses terbentuknya kerukunan antarumat beragama sebagai modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui dokumen, arsip, literatur, maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian lapangan serta membantu peneliti memahami kondisi umum wilayah penelitian.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen RPJMDes Desa Bangun Sari, profil desa, arsip kegiatan masyarakat, dokumentasi desa, jurnal ilmiah, buku, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan transmigrasi, modal sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kerukunan antarumat beragama.

Data sekunder tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah transmigrasi di Desa Bangun Sari, kondisi sosial masyarakat, komposisi penduduk berdasarkan agama dan suku, perkembangan kehidupan sosial masyarakat, serta kebijakan dan program pemberdayaan yang berkembang di desa. Selain itu, data sekunder juga membantu peneliti dalam menganalisis proses perubahan hubungan sosial masyarakat dari pola hubungan berbasis kelompok asal menuju hubungan sosial yang lebih integratif dan harmonis antarkelompok masyarakat.

#### **1.10.6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki peran penting dalam menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi perlu dianalisis secara sistematis agar dapat menghasilkan temuan yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Creswell (2009), data yang telah disajikan memerlukan analisis mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas serta mencatat hasil temuan secara transparan dalam laporan penelitian. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a) Reduksi Data**

Reduksi data merupakan tahap awal dalam proses analisis data yang dilakukan dengan cara menyederhanakan, memilih, dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses seleksi terhadap hasil wawancara, catatan observasi, serta dokumen penelitian untuk menentukan data yang relevan dengan fokus penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis kerukunan antarumat beragama di Desa Bangun Sari. Proses reduksi data dilakukan dengan memilah

informasi penting yang berkaitan dengan dinamika kehidupan masyarakat transmigran, proses integrasi sosial, bentuk kerukunan antarumat beragama, peran tokoh masyarakat, serta bentuk pemberdayaan masyarakat yang berkembang di desa. Data yang dianggap kurang relevan atau tidak berkaitan dengan fokus penelitian kemudian disederhanakan agar analisis dapat lebih terarah.

b) Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap penyusunan data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bertujuan untuk membantu peneliti melihat pola, hubungan, dan makna dari data yang diperoleh di lapangan. Penyajian data juga memudahkan peneliti dalam melakukan interpretasi terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, matriks, dan bagan yang menggambarkan proses kehidupan sosial masyarakat Desa Bangun Sari. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara mendalam mengenai hubungan sosial masyarakat transmigran, perkembangan interaksi antarumat beragama, serta proses terbentuknya model pemberdayaan masyarakat berbasis kerukunan sosial.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan dengan menginterpretasikan seluruh hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama, pola hubungan sosial, serta makna yang muncul dari data penelitian mengenai kerukunan antarumat beragama sebagai modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat Desa Bangun Sari. Peneliti kemudian menghubungkan hasil temuan lapangan dengan teori yang digunakan, seperti teori pemberdayaan masyarakat dan teori modal sosial, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai model pemberdayaan masyarakat yang terbentuk di Desa Bangun Sari.

### **1.10.7. Validitas Data**

Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kelompok narasumber, yaitu pemerintah desa, tokoh agama Hindu, islam dan generasi pertama transmigran. Informasi mengenai sejarah hubungan antarkelompok, proses integrasi sosial, bentuk interaksi antarumat beragama, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diperoleh dari satu narasumber kemudian diverifikasi dengan keterangan narasumber lainnya untuk melihat tingkat konsistensi dan kesesuaiannya. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan temuan observasi lapangan dan data dokumentasi, seperti profil desa, arsip kegiatan masyarakat, serta dokumen perencanaan desa. Teknik triangulasi ini digunakan untuk memastikan keandalan, konsistensi, dan keabsahan data sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.